

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, Dunia dihebohkan dengan sebuah wabah penyakit jenis baru bernama *Corona Virus Diseases 2019* atau biasa disebut dengan COVID-19, *Corona Virus Diseases 2019* pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di wilayah Wuhan yang berada di Negara China. Wabah penyakit *Corona Virus Diseases 2019* tersebut menyerang sistem imun manusia yang cara penularannya dapat melalui kontak langsung dengan orang-orang yang berada disekitar pengidap *Corona Virus Diseases 2019* tersebut.

Penularan wabah penyakit *Corona Virus Diseases 2019* ini sangat cepat menyebar secara merata di seluruh wilayah China sehingga wabah penyakit ini digolongkan sebagai suatu pandemi. Pandemi merupakan sebuah wabah penyakit yang menyebar secara merata diseluruh wilayah secara geografis baik disuatu daerah maupun di suatu Negara.

Seperti yang disebutkan diatas, akibat penyebaran wabah penyakit *Corona Virus Diseases 2019* yang sangat cepat di negara China tersebut, pada awal tahun 2020 muncul beberapa kasus wabah penyakit *Corona Virus Diseases 2019* ini di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini terjadi karena disebabkan oleh adanya kontak langsung warga negara tersebut dengan pengidap *Corona Virus Diseases 2019*.

Kasus COVID-2019 di Indonesia pertama kali muncul pada awal Maret tahun 2020, Karena penyebarannya yang sangat cepat, pada bulan yang sama

dalam kurun waktu 2 minggu kasus *Corona Virus Diseases 2019* telah menyebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta , Bali, Bandung, dan Berbagai daerah di wialayah Indonesia lainnya.

Dengan adanya COVID-19 ini terdapat berbagai macam permasalahan sosial baru di Negara Indonesia. Terlebih lagi saat penambahan kasus *Corona Virus Diseases 2019* semakin tinggi di seluruh wilayah di indonesia, karena pengaruh wabah penyakit *Corona Virus Diseases 2019* ini bukan hanya berdampak pada Kesehatan, melainkan pada bidang lainnya seperti Ekonomi, Pariwisata, Pendidikan, dan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Negara Republik Indonesia pada awal terjadinya pandemi *Corona Virus Diseases 2019* ini, yaitu Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan tegas meminta agar beberapa aktivitas masyarakat diberhentikan untuk sementara waktu terutama pada aktivitas Pendidikan seperti belajar mengajar dan aktivitas pariwisata seperti menutup sementara beberapa objek pariwisata.

Dengan adanya kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan baru lagi yaitu pada bidang ekonomi, hal ini dikarenakan proses kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi tidak berjalan dengan semestinya. Ekonomi adalah suatu faktor utama yang memiliki arti yang sangat penting didalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan aktivitas sehari-hari manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal

dan kebutuhan lainnya yang memerlukan suatu sektor dibidang ekonomi yang sangat kuat (Apriyanto & Ramli, 2020).

Sejak munculnya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Diseases 2019* seluruh kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi di Indonesia tersebut mengalami kekacauan hal ini dipengaruhi oleh beberapa sektor ekonomi yang terpaksa harus berhenti karena beberapa faktor yang terjadi di sektor tersebut baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi di Indonesia berhenti adalah adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dan hal ini menyebabkan beberapa perusahaan di sektor ekonomi harus memberhentikan beberapa pegawainya untuk mentaati kebijakan yang ada. Selain itu beberapa aktivitas ekonomi lain seperti perdagangan, pertanian, peternakan, industri dan yang lainnya juga terpaksa harus menghentikan kegiatannya karena kebijakan tersebut.

Dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang tiba-tiba berhenti ini memunculkan banyaknya pengangguran kerja di negara Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini, sehingga muncul terjadinya kesenjangan sosial dimasyarakat. Kesenjangan sosial tersebut dapat memberikan dampak yang dapat dikatakan memprihatinkan di kalangan masyarakat, karena dengan adanya tuntutan untuk bertahan hidup ditengah pandemi COVID-19 ini terdapat banyak kasus kejahatan yang muncul akibat beberapa masyarakat kehilangan pekerjaannya ditengah pandemi *Corona Virus Diseases* ini.

Sehingga dari itu, Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan sosial terkait perekonomian di Indonesia dan diwajibkan untuk memberikan jaminan ekonomi masyarakat di Indonesia, dikarenakan faktor ekonomi berperan sebagai suatu faktor yang sangat berpengaruh di dalam aktivitas masyarakat, faktor ekonomi tersebut juga dapat dikatakan sebagai suatu faktor Pendukung sebuah pembangunan nasional hal ini dikarenakan suatu pertumbuhan ekonomi negara yang baik dapat meningkatkan perkembangan Nasional pada masa pandemi COVID-19 ini.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang muncul pada masa pandemi ini, Pemerintah Negara Republik Indonesia membentuk dan menetapkan beberapa kebijakan sosial yang digunakan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia terutama perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakat miskin, karena masyarakat tersebut merupakan kelompok masyarakat yang perekonomiannya paling terdampak akibat penyebaran COVID-19 ini. Beberapa kebijakan sosial yang dibentuk oleh pemerintah Negara Republik Indonesia pada masa pandemi *Corona Virus Disease* ini memiliki tujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease* ini.

Berdasarkan penjabaran diatas, Melalui kebijakan sosial yang di bentuk, Pemerintah Negara Republik Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikan dan memperbaiki keadaan dengan menerapkan kebijakan tersebut secara tepat terutama pada sektor ekonomi masyarakat yang sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Dari sekian banyak kebijakan

sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu kebijakan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dapat meringankan kegiatan ekonomi masyarakat adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional pada bidang ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bidang ketenagalistrikan merupakan sektor yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan warga masyarakat di Indonesia. Masyarakat Indonesia memanfaatkan tenaga listrik untuk melakukan seluruh aktivitas di kehidupan sehari-hari, dimana listrik yang digunakan adalah listrik yang dikelola oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang setiap bulannya memberikan tagihan atau penarikan uang terhadap masyarakat yang memanfaatkan penggunaan listrik tersebut. Hal itu tentu saja menyulitkan masyarakat yang sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 ini. Akibat dari beberapa masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, terdapat banyak diantara mereka yang memiliki kesusahan dalam membayar tagihan penggunaan listrik.

Maka dari itu, Kementerian Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan subsidi tarif listrik konsumen PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) pada masa pandemi COVID-19 yang tertulis dalam Keputusan menteri ESDM No. 29. K. HK. 02. MEM. L. 2021 mengenai pemberian stimulus tarif listrik konsumen PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) dalam rangka menghadapi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Keputusan Menteri ESDM No. 29. K. HK. 02. MEM. L. 2021 tersebut berisi mengenai keputusan penetapan pemberian subsidi berupa Stimulus Tarif Tenaga Listrik kepada seluruh Konsumen 450VA dan 900 VA PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka untuk Menghadapi seluruh Dampak yang muncul dengan adanya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu dengan berupa pemberian diskon tarif tenaga listrik, Sebagaimana fokus Pemerintah untuk menjamin masyarakat miskin, Pemerintah memberikan pembebasan tagihan listrik untuk seluruh pengguna daya 450 VA dan diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pengguna daya 900 VA subsidi selama 3 bulan, yaitu pada bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2020.

Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Dan Sumber Daya Mineral Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berupaya memastikan agar seluruh bantuan listrik selama pandemi Corona Virus Disease 2019 ini bisa diterima oleh rakyat melalui perangkat pemerintah terendah seperti kabupaten, kecamatan, dan desa/Desa. Ada dua kategori tarif bagi pengguna yang menerima bantuan, yaitu 450 VA dan 900 VA, dan ada dua jenis pengguna untuk masing-masing kelompok tarif ini, yaitu: pengguna pascabayar (reguler) dan pengguna prabayar (token).

Hal ini tentu saja sangat membantu masyarakat miskin pengguna jasa tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara diseluruh wilayah di Indonesia terutama untuk pengguna daya 450 VA, karena baik penggunaan listrik reguler atau

pascabayar seluruhnya akan bebas biaya pemakaian pada tagihan listrik di bulan April, Mei, dan Juni 2020.

Dari penjabaran diatas, Sasaran penerima bantuan secara umum cukup tepat yaitu masyarakat miskin dan rentan, yang bertujuan untuk membantu meringankan pengeluaran kebutuhan rumah tangganya pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 saat ini. Namun hal ini akan lebih menarik untuk dipelajari lebih dalam lagi terlebih bantuan pembebasan tarif listrik ini dilakukan diseluruh wilayah di Indonesia, dan untuk memastikan apakah kebijakan sosial subsidi tarif listrik tersebut sudah merata, penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam mengenai keberhasilan implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik ini terutama pada penerima bantuan pengguna daya 450 VA di Kabupaten Sleman khususnya Desa pakembinangun.

Sejak awal pandemi Corona Virus Disease 2019, Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah yang jumlah kasus penambahan Corona Virus Disease 2019, yang cukup tinggi, hal ini tentu saja juga menimbulkan beberapa permasalahan perekonomian di wilayahnya khususnya di Desa pakembinangun terlebih lagi pakembinangun merupakan salah satu daerah di kecamatan pakem, kabupaten sleman yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pakem seperti dengan adanya pasar, beragam objek wisata, Kawasan industri dan lainnya, maka dari itu terdapat beragam jenis mata pencaharian di Desa tersebut. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 ini memungkinkan beberapa masyarakatnya juga ikut terdampak pada bidang ekonomi tersebut

seperti kehilangan pekerjaannya dan yang lainnya. Yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya.

Penelitian ini akan difokuskan kepada Implementasi kebijakan dengan mengukur keberhasilan kebijakan yang diterapkan dan didalamnya mencakup mengenai kebijakan sosial yang merupakan bagian dari kebijakan publik, dimana dalam hal ini kebijakan sosial yang ditetapkan adalah mengenai subsidi tarif listrik, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Teori yang akan diterapkan dalam penelitian ini merupakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S Grindle (1986) beliau menerangkan bahwa implementasi kebijakan memiliki dua variabel utama yang dapat mengukur keberhasilan implementasi, variabel tersebut adalah isi dari kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), kedua variabel tersebut mencakup beberapa hal. Dalam variabel isi kebijakan harus mencakup kepada seluruh kelompok sasaran atau *target groups* berupa individu atau kelompok yang dapat memunculkan reaksi berupa kepuasan atau kerugian yang akan menyebabkan perlawanan, manfaat yang didapatkan sasaran berupa manfaat secara kolektif dan tidak langsung, sejauh mana target yang akan dicapai berkaitan dengan perubahan perilaku sasaran yang dipengaruhi manfaat dan waktu tujuan tercapai.

Dalam penelitian ini pada teori implementasi kebijakan dalam variabel isi kebijakan yang dimaksud terdapat di dalam Keputusan Menteri ESDM No. 29. K.HK. 02. MEM. L. 2021 yang berisi mengenai peraturan dan penjabaran kelompok sasaran yang dimana dalam penelitian ini kelompok sasaran yang dimaksud adalah Masyarakat Kabupaten Sleman khususnya di desa pakembinangun Pakem yang mendapatkan bantuan subsidi tarif listrik 450 VA.

Maka dari itu penelitian ini akan lebih fokus pada masyarakat di Kabupaten Sleman khususnya Desa pakembinangun, Pakem yang menerima bantuan potongan subsidi tarif listrik konsumen rumah tangga daya 450 VA karena hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra juga dimasyarakat karena potongan subsidi yang diberikan sebesar 100% serta untuk mengetahui apakah kelompok sasaran masyarakat konsumen rumah tangga daya 450 VA di Kabupaten Sleman tersebut benar benar menerima subsidi tarif listrik tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 29.K.HK.02.MEM.L.2021 dan dilandasi dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan dan berasal dari Merilee S Grindle tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah utama yaitu bagaimana keberhasilan implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik 450 VA pada masa pandemi COVID-19 di desa Pakembinangun.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik 450 VA pada masa pandemi COVID-19 di desa Pakembinangun.
2. Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan sosial subsidi tarif listrik di masa pandemi COVID-19 terhadap kelompok sasaran di desa pakembinangun sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 29.K.HK.02.MEM.L.2021.
3. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh kelompok sasaran dengan adanya kebijakan sosial subsidi tarif listrik di masa pandemi COVID-19 di desa pakembinangun.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Sosial Subsidi Tarif Listrik 450 VA Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Pakembinangun
 - b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian.
2. Manfaat bagi akademisi

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui dan lebih memahami implementasi kebijakan sosial subsidi tarif listrik 450 VA pada masa pandemi COVID-19 di desa Pakembinangun
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk Universitas khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan mengenai topik implementasi Kebijakan Sosial, dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis di kemudian hari.

1.5. Sistematika BAB

Dalam menyusun tugas akhir/skripsi ini, terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

1.1.1. BAB,I.Pendahuluan

BAB I dari penelitian ini akan berisi mengenai latar belakang dari masalah yang menjadi topik skripsi, selain itu pada bab ini juga akan terdapat rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

1.1.2. BAB,II Tinjauan Pustaka

BAB,II penelitian ini akan berisi mengenai penjelasan dari konsep dari teori yang digunakan yang memiliki kaitan dengan tema didalam penelitian ini yaitu berhubungan dengan kebijakan publik/kebijakan sosial, beserta penjelasan mengenai definisi konsep serta definisi operasional dari teori yang digunakan, dan kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu.

1.1.3. BAB III Metode Penelitian

BAB III penelitian ini berisi mengenai desain penelitian yang akan dilakukan, objek dari penelitian, subjek penelitian, jenis serta sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, dan teknik analisis data yang akan diperoleh dari penelitian.

1.1.4. BAB IV Hasil Dan Pembahasan

BAB IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memberikan penjelasan terkait dengan data yang diperoleh berdasarkan penelitian. Selain deskripsi, data penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk ilustrasi seperti foto, gambar, tabel, grafik, diagram, dan lain-lain. Hasil penelitian dapat dideskripsikan dimulai dengan pembahasan Gambaran Lokasi Penelitian atau Profil Informan, kemudian mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan selesai.

1.1.5. BAB V Penutup

BAB V menyatakan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti terkait, berupa kesimpulan dan saran.